

Komunikasi Politik dalam Sistem Politik¹

Beberapa ilmuan melihat komunikasi politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Oleh karena itu komunikasi politik dianggap memiliki fungsi yang sangat istimewa sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa. Bahkan Plano (1982 : 24) melihat bahwa komunikasi politik merupakan proses penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik". Secara **formal** objek komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersifat politik (**political outcomes**) disamping sebagai salah satu fungsi yang menjadi syarat untuk berfungsinya sistem politik. Jika komunikasi politik dipandang sebagai jembatan metodologis antara disiplin ilmu komunikasi dan ilmu politik maka objek formal komunikasi politik juga adalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna (**the commonness in meaning**) tentang fakta dan peristiwa politik. Sedangkan *objek material komunikasi politik* menurut Sartori (dalam Rush dan Althoff, 1971 : 46) adalah "dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politis dari komunikasi" sesuai dengan apa yang dikemukakan empat komponen dalam komunikasi politik yaitu : (1) Lembaga-lembaga politik dan aspek komunikasi politik; (2) Institusi Media dengan aspek politiknya; (3) Orientasi khalayak terhadap komunikasi dan (4) Aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi. (Arriane dalam Mulyana dan Solatun, 2007: 29-30)

Tema-tema studi komunikasi politik pada umumnya berkisar diseputar, bagaimana peranan komunikasi di dalam fungsi politik, sebagai contoh menurut Alfian dalam bukunya "Komunikasi Politik dan Sistem Politik (1993), bahwa komunikasi politik diasumsikan sebagai yang menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersembahkan semua kegiatan sistem politik, sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.

¹ Disampaikan pada kuliah Komunikasi Politik pertemuan Ke-4

Kemudian pendapat Almond dan Powell (1966) tentang komunikasi politik, semakin memperjelas keterkaitan antara komunikasi dan politik dalam pendekatan teori sistem (**political system**) bahwa komunikasi politik sebagai salah satu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen politik yang terdapat dalam suatu sistem politik.

Dengan memandang inti komunikasi sebagai proses interaksi sosial dan inti politik sebagai konflik sosial. Bahkan menurut kedua pakar tersebut komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain, sehingga komunikasi politik menjadi salah satu fungsi politik dalam sistem politik. Artinya komunikasi politik berkaitan erat dengan sistem politik, dan sebaliknya sistem politik mempengaruhi corak komunikasi politik. Kemudian Almond (Alfian, 1993 : 5-15) menyatakan lagi komunikasi dalam sistem politik ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) dalam proses sistem politik, hasilnya dialirkan kembali oleh komunikasi, yang selanjutnya menjadi umpan balik (*feedback*) sistem politik. Artinya proses sistem politik, terdiri dari **infrastruktur politik** yang memiliki fungsi politik (**input**) berupa dukungan dan tuntutan yang berperan disini adalah masyarakat atau rakyat (yang dikuasai) yang terhimpun dalam partai politik, kelompok kepentingan (**interest group**), kelompok penekan (**pressure group**), organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau termasuk apa yang disebut **non-government organizations** (NGO) dan media massa. Kemudian aspirasi dan opini berupa tuntutan atau dukungan dari infrastruktur politik tersebut di konversi, sehingga akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan (**decision making process**) yang nantinya mempengaruhi serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik (**public policy**) yang dihasilkan oleh **supratruktur politik** (memiliki fungsi *output*) terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berupa regulasi, seperti peraturan-peraturan, hukum dan undang-undang.. Jadi fungsi politik itu sendiri berperan sebagai; **Pertama**, sarana komunikasi politik; **Kedua**, sarana rekrutmen politik; **Ketiga**, sarana sosialisasi

politik; dan **Keempat**, sebagai sarana pengatur politik. Kalau dari segi prosesnya dalam fungsi politik itu adalah :

1. Agregasi kepentingan (***interest aggregation function***), pada fungsi ini terdapat proses penggabungan kepentingan, untuk kemudian dirumuskan dan disalurkan kepada pemegang kekuasaan atau pemerintah yang memegang kekuasaan dan yang berwenang (***authority*** atau ***legalized power***) untuk dijadikan kebijakan publik (***public policy***).
2. Fungsi artikulasi kepentingan (***interest articulation function***), pada fungsi ini terjadi proses sintesis aspirasi individu-individu sebagai anggota kelompok yang berupa ide, pendapat yang kemudian dijadikan pola dan program politik.

Kemudian kebijakan publik itu akan di umpan balik (***feedback***) dan direspon atau ditanggapi lagi oleh infrastruktur politik, baik didukung maupun tidak. Sebagaimana konsep Almond dan Powell (Dwidjowidjoto, 2004 : 59) bahwa konsep sistem dengan mempergunakan basis berfikir dari **David Easton** yang mengatakan adanya dua hal yang penting dalam sistem politik yaitu ***input***, ***conversion***, ***out put*** dan ***feedback*** sebagaimana dalam bukunya ***A System Analysis of Political Life*** (1965) adalah keseluruhan dari interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian nilai bagi masyarakat. Kerja sistem politik ditentukan oleh adanya suatu masukan (***input***) dari lingkungan, dan setelah melalui proses tertentu membentuk sejumlah output yang selanjutnya diberikan kembali pada lingkungan sebagai umpan balik (***feedback***) (Penaju, 1994 : 52). Karena menurut komunikasi politik, rakyat memberi dukungan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik, sehingga melalui komunikasi pula rakyat dapat mengetahui apakah dukungan, aspirasi dan pengawasan itu tersalur atau tidak dalam berbagai kebijaksanaan politik (Rauf, 1993 : 3)

Oleh sebab itu, fungsi politik yang berkaitan dengan fungsi komunikasi dapat dibagi kedalam dua situasi, yaitu: Pertama fungsi komunikasi politik yang

berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah "*the governmental political sphere*"; Kedua Fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah "*the socio political sphere*" Artinya komunikasi politik yang berada pada struktur masyarakat, dapat dilihat dari fungsi agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung diantara kelompok asosiasi dimana proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil proses agregasi dan artikulasi. Fungsi komunikasi politik dalam hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik, berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas yang bersifat independensi dalam berlangsungnya suatu sistem dan lingkup negara (Soemarno, 1995 : 29-30).

Hal tersebut dapat dilihat dari definisi Almond dan Powell (Reed Blake, 2003 : 51) bahwa : "Semua fungsi yang ditampilkan dalam sistem politik, rekrutmen dan sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, pembuatan peraturan, dan pelaksanaan sanksi diwujudkan melalui alat komunikasi. Orang tua, guru, pemuka agama misalnya memperoleh sosialisasi politisnya melalui komunikasi. Wakil-wakil dan pemimpin kelompok melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi dengan mengkomunikasikan tuntutan serta menyarankan kebijaksanaan, Para anggota dewan legislatif membuat undang-undang berdasarkan informasi yang disampaikan kepada mereka dan melalui komunikasi di antara mereka serta berbagai unsur lainnya dalam menerima dan menganalisis informasi dari masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat lainnya."

Begitu juga menurut Liliweri (2002 : 3) bahwa komunikasi politik : Merupakan suatu proses, aktivitas dan kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan masalah politik, dengan kata lain komunikasi politik adalah proses pertukaran pesan-pesan politik diantara komunikator politik, misalnya anggota DPRD dan komunikator politik (masyarakat), propaganda, atau kampanye partai

politik. Sehingga komunikasi politik lebih merupakan kebijaksanaan umum guna menentukan bagaimana seharusnya mengelola atau memenej komunikasi.

Sedangkan gejala komunikasi politik menurut Michael Schudson (1997 : 311) dapat dilihat dari dua arah. **Pertama**, bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. **Kedua**, bagaimana infrastruktur politik merespons dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.

Sistem Politik:

Proses mengubah Input menjadi output.

- Input : Kepentingan dan Aspirasi Publik.
- Proses → Konversi
- Output: : Kebijakan Publik, Keputusan Politik, UU (yg dihasilkan oleh Legislatif dan Eksekuitf) dan Kebijakan Pemerintah yang lain
- Feed back : sesuatu yang bersifat menggugat.